



STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA MUTUNGGEDING KECAMATAN UMALULU KABUPATEN SUMBA TIMUR

Fransiskus Xaverius Candra Gunawan¹

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Timur, NTT, Indonesia, gunawanfrans1@gmail.com

Korespondensi Penulis: Fransiskus Xaverius Candra Gunawan

Abstrak: Penelitian ini merupakan bentuk gagasan konseptual yang dilakukan dengan mencermati dan mengkaji faktor-faktor penyebab masalah kemiskinan yang seringkali terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumba Timur yang menyebabkan masalah kemiskinan senantiasa ada di Masyarakat dan seperti lingkaran setan yang terus menghantui kehidupan. Hal ini semakin mencemaskan apabila dikaitkan dengan prediksi bahwa akan terjadi lonjakan yang sangat drastis dalam tahun 2025 sampai 2030 dimana tingkat pengangguran khususnya kaum muda akan mengalami titik tertinggi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil kajian konseptual tersebut maka sangat penting untuk dilakukan penelitian secara menyeluruh terkait aspek kepemilikan aset, sosial ekonomi, budaya, dan peranan Pemerintah dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur khususnya Desa Mutunggeding yang merupakan salah satu desa yang terletak dalam Kecamatan Umalulu yang hingga sekarang masih memiliki permasalahan dengan kemiskinan.

Kata kunci : kemiskinan, sumba timur, umalulu, mutunggeding.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan adalah masalah krusial yang menjadi perhatian utama setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah terus mengupayakan program-program strategis pembangunan nasional yang dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan tersebut. Namun hal ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan karena masalah kemiskinan memiliki ragam kompleksitas permasalahan dan dimensi yang berbeda. Mubyarto (1997) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan gambaran situasi yang serba kekurangan dan ketidakberdayaan penduduk miskin yang disebabkan karena mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan dan juga struktur sosial ekonomi tidak membuka peluang orang miskin keluar dari lingkungan kemiskinan yang tak berujung pangkal.

Apa itu kemiskinan ? World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan / daya beli yaitu US \$1 atau US \$ 2 per kapita perhari. Sementara itu, BPS mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan (poverty line) sedangkan Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok

orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan akan hak-hak dasarnya¹. Pandangan tentang kemiskinan di atas menjelaskan bahwa masalah kemiskinan erat kaitannya dengan masalah pengangguran yakni kurangnya akses tenaga kerja produktif terhadap lapangan kerja (*I G W Murjana Yasa*). Selain itu, kemiskinan diyakini juga sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan (Faturachman, dkk., 2007; I G. W. Murjana Yasa).

I G. W. Murjana Yasa pernah melakukan penelitian tentang penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di Provinsi Bali yang menyatakan bahwa salah satu solusi yang dapat diberikan dalam penanggulangan kemiskinan yakni dengan membangun desa secara terintegrasi dan berbasis partisipasi masyarakat. Tanggungjawab dalam pengentasan kemiskinan terletak pada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan lokal yang ada pada daerahnya masing-masing dan Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator. Hasil penelitian ini menekankan pada aspek pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Anggricia Mardha Kashi (2016) tentang Upaya Pengentasan Kemiskinan Buruh Genteng Melalui Kegiatan Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Sentra Industri Genteng Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen; Nugraha Utama Sudarsana (2015) dalam Perencanaan Partisipatif Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan I Made Tamba dan I Wayan Cipta (2009) dalam penelitian tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Karangasem Bali.

Selain itu, Vanda Ningrum (2013) juga pernah melakukan kajian tentang peranan Pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yang berimplikasi langsung terhadap masalah kemiskinan. Dalam laporan yang berjudul **“Tantangan Sosial Ekonomi Pengangguran Usia Muda di Indonesia”** disebutkan bahwa : 1) berbagai kebijakan terkait kaum muda masih belum terlaksana dengan efektif dan saat ini, baru 28,5 persen dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang menargetkan secara spesifik kaum muda di Indonesia, 2) distribusi pelaksanaan program belum mengarah pada pembangunan pedesaan, sehingga migrasi kaum muda dari desa ke kota terasa tinggi dan ekonomi perkotaan sendiri tidak mampu menyerap besarnya migrasi kaum muda tersebut, 3) pertanian pedesaan mengalami kekurangan tenaga kerja muda. Minat kaum muda untuk bekerja di pertanian masih sangat kecil dengan alasan rendahnya pendapatan yang diterima, 4) program peningkatan nilai di sektor pertanian seperti akses lahan bagi kaum muda, agrobisnis, ekowisata di pedesaan sangat diperlukan untuk menarik kembali minat kaum muda melanjutkan pekerjaan di pertanian, 5) kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pekerja muda harus menjadi bagian dari strategi menyeluruh dari ketersediaan lapangan kerja melalui pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang intensif, 6) pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada pekerjaan yang mampu menampung tingginya

¹ Erwan Agus Purwanto, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007 (295-324), ISSN 1410-4946, “Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia”.

jumlah angkatan kerja muda dengan distribusi yang merata untuk menghindari migrasi yang besar dari kalangan muda ke perkotaan dan 7) penting untuk mengadopsi kebijakan makro ekonomi yang baik dan mempromosikan pertumbuhan kerja menyeluruh sebagai sebuah dasar untuk mengatasi masalah pekerjaan bagi kaum muda.

Kabupaten Sumba Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi ketiga yakni sebesar 31,03 persen setelah kabupaten Sumba Tengah dan Sabu Raijua (*BPS Kabupaten Sumba Timur, 2017*). Data ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ada sekitar 78,78 ribu jiwa penduduk Sumba Timur yang masih berada pada garis kemiskinan. Hal ini secara prosentase mengalami penurunan dari data dua tahun sebelumnya yakni pada tahun 2015 sebesar 31,74 persen (77,95 ribu jiwa) dan tahun 2016 sebesar 31,43 persen (78,19 ribu jiwa). Namun, apabila dicermati akumulasi jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) dan bahkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat besar yakni sebesar 166.998 jiwa dengan kriteria sebagai berikut Desil 1 sebanyak 26.974 jiwa, Desil 2 sebanyak 34,673 jiwa, Desil 2 sebanyak 35.360 jiwa, Desil 4 sebanyak 29.305 jiwa dan Desil 5 sebanyak 40.657 jiwa (*BPS Kabupaten Sumba Timur, 2018*).

Menyikapi hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan Rapat Evaluasi (13/12/2019) bertempat di Aula Sekda yang melibatkan Kepala Badan/Dinas terkait dan para Camat se Kabupaten Sumba Timur. Dalam rapat ini disebutkan bahwa jumlah kelahiran dari keluarga miskin mengalami peningkatan yang berdampak pada peningkatan prosentase kemiskinan. Selain itu, program pembangunan desa yang dilaksanakan selama ini belum menyentuh akar permasalahan dari kemiskinan itu sendiri dan manipulasi data penduduk miskin masih banyak terjadi di tingkat masyarakat. Hal ini memberikan gambaran tentang problematik masalah kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur yang sudah saatnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah dan perlu adanya solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Huraerah (2005) tentang kekeliruan paradigmatik yang masih sering terjadi dalam program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, seperti : 1) Masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional, 2) Lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati) daripada produktivitas, 3) Memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek daripada subyek, dan 4) Pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator. Vijaya Murali & Femi Oyebode (2004) mengatakan, "Poverty is a multidimensional phenomenon, encompassing inability to satisfy basic needs, lack of control over resources, lack of education and poor health. Poverty can be intrinsically alienating and distressing, and of particular concern are the direct and indirect effects of poverty on the development and maintenance of emotional, behavioural and psychiatric problems".

Desa Mutunggeding merupakan salah satu desa yang terletak dalam wilayah administratif Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. Sebagian besar Masyarakat Lokal bekerja sebagai petani, peternak dan nelayan dan merupakan warga etnis sumba yang masih

memegang teguh adat istiadat dan budaya Marapu yakni kepercayaan asli nenek moyang orang sumba .

Tabel 1. Penduduk dan Pekerjaan Desa Mutunggeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019

DESA	PENDUDUK			KK	DUSUN	PETANI	PETERNAK	NELAYAN	LAINNYA
	JUMLAH	LAKI	PEREMPUAN						
MUTUNGGEDING	2349	1223	1226	468	4	775	638	28	908

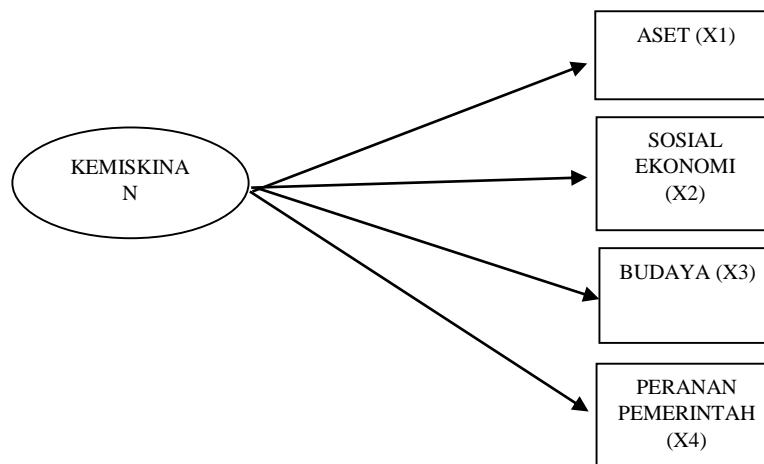
Sebagian besar dari 468 kepala keluarga yang berada dalam empat dusun di desa Mutunggeding masih memiliki banyak masalah terkait hasil panen yang kurang memuaskan atau tidak seperti yang diharapkan, seperti adanya serangan hama dan penyakit. Begitupun dengan warga yang bekerja sebagai peternak dan nelayan yang memiliki masalah dan tantangan tersendiri yang menyebabkan mereka belum dapat keluar dari masalah kemiskinan. Selain itu, kehidupan masyarakat yang masih kental dengan kehidupan adat istiadat dan budaya yang masih mengenal tingkatan (strata) dalam kehidupan social kemasyarakatan juga menjadi tantangan tersendiri dalam strategi penanggulangan kemiskinan tanpa mendistorsi nilai-nilai luhur tersebut. *Broadly speaking, relational poverty analysis focuses on the socio-economic-political relationships between the poor and those who are in position to affect their life (Wood, 2003; Elwood et al., 2017). As Wood (2003, p. 456) notes, 'people are poor because of others', who 'have more control over them' (Guy Feldman. 2019).*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbentuk gagasan konseptual yang bersumber dari literatur jurnal nasional dan internasional serta data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Adapun sampel dan populasi yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur khususnya pihak terkait yang mengurus masalah kemiskinan dan Masyarakat Lokal desa Mutunggeding Kecamatan Umalulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian konseptual di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyebab kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur khususnya Desa Mutunggeding Kecamatan Umalulu dapat disebabkan oleh empat factor, yakni aspek kepemilikan aset, sosial ekonomi, budaya, dan peranan Pemerintah dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur.



Gambar 1. Variabel Penelitian

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan problematik masalah kemiskinan, yakni tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat khususnya di Desa Mutunggeding Kecamatan Umalulu maka penting untuk dapat dilakukan penelitian yang komprehensif dengan fokus penelitian pada hal-hal sebagai berikut :

1. Kajian pada faktor kepemilikan aset sebagai penyebab kemiskinan di desa Mutunggeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur.
2. Kajian pada faktor sosial ekonomi sebagai penyebab kemiskinan di desa Mutunggeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur.
3. Kajian pada faktor budaya sebagai penyebab kemiskinan di desa Mutunggeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur.
4. Kajian pada faktor peranan Pemerintah dalam proses penanggulangan kemiskinan di desa Mutunggeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur.

DAFTAR RUJUKAN

- I G. W. Murjana Yasa. 2020. "Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Bali". <https://media.neliti.com/media/publications/43814-ID-penanggulangan-kemiskinan-berbasis-partisipasi-masyarakat-di-provinsi-bali.pdf>. diakses 10-01-2020.
- Erwan Agus Purwanto. 2007. "Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007 (295-324), ISSN 1410-4946.
- Nano Prawoto. 2009. "Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 9 Nomor 1. April 2009 : 56 - 68. <https://media.neliti.com/media/publications/30659-ID-memahami-kemiskinan-dan-strategi-penanggulangannya.pdf>.
- Sumba Timur Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur.
- Kecamatan Umalulu Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur.

- Vijaya Murali & Femi Oyeboode. 2004. *“Poverty, social inequality and mental health”*. Advances in Psychiatric Treatment (2004), vol. 10, 216–224.
- Anggriena Mardha Kashi dan Ahmad Zuber. 2016. *“Upaya Pengentasan Kemiskinan Buruh Genteng Melalui Kegiatan Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Sentra Industri Genteng Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen”*. Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 31, No. 1 Tahun 2016 ISSN : 0215/9635.
- Nugraha Utama Sudarsana. 2015. *“Perencanaan Partisipatif Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta”*. REFORMASI ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Vol. 5, No. 1, 2015.
- I Made Tamba dan I Wayan Cipta. 2009. *“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Karangasem Bali”*. Agrimeta, JURNAL PERTANIAN BERBASIS KESEIMBANGAN EKOSISTEM.
- Vanda Ningrum. 2013. *“Tantangan Sosial Ekonomi Pengangguran Usia Muda di Indonesia”*. Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 8 No.2 Tahun 2013 (ISSN 1907-2902).
- Guy Feldman. 2019. *“Towards a Relational Approach to Poverty in Social Work: Research and Practice Considerations”*. British Journal of Social Work (2019) 49, 1705–1722 doi: 10.1093/bjsw/bcy111 Advance Access Publication December 15, 2018.